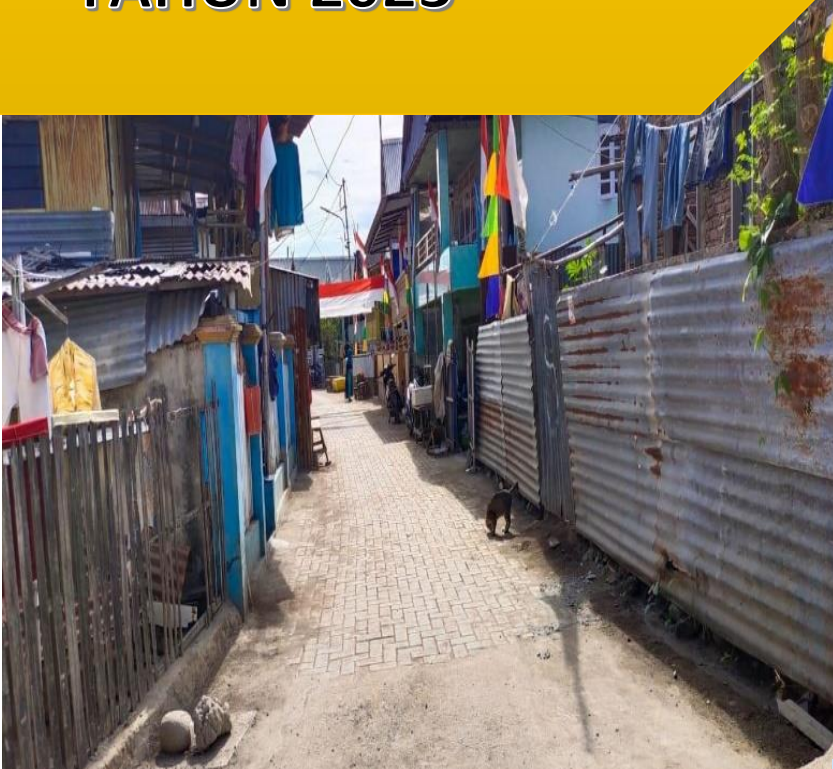


# L K I P

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023, memuat perencanaan dan perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja dan capaian realisasi program dan kegiatan yang terukur sesuai dengan output, permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan program, kegiatan dan solusi yang ditempuh serta keberhasilan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dicapai pada tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 dan diharapkan sumbangsih dan saran perbaikan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini hingga selesai.

Makassar, Februari 2024

Kepala Dinas,



Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES  
Pembina Utama Madya (IV.d)  
NIP. 19650531 199111 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Gambaran Umum .....	1
1.2. Sasaran Strategis .....	8
1.3. Permasalahan Utama ( <i>strategic issued</i> ).....	8
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Rencana Strategi.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	12
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023.....	13
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
3.1 Capaian Kinerja .....	15
3.2 Realisasi Anggaran .....	68
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum

Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai 2 (dua) urusan yaitu (1) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan (2) Urusan Pertanahan.

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib pemerintahan daerah dan terkait dengan pelayanan dasar dengan uraian : (1) Sub Urusan Perumahan, Kewenangan Provinsi mencakup (a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi (b) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah provinsi. (2) Sub Urusan Kawasan Permukiman, Kewenangan Provinsi mencakup Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha. (3) Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), Kewenangan Provinsi mencakup penyelenggaraan PSU permukiman. (4) Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kewenangan Provinsi mencakup sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah dan terkait dengan pelayanan dasar dengan uraian (1) Sub Urusan Izin Lokasi, Kewenangan Provinsi mencakup pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. (2) Sub Urusan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Kewenangan Provinsi mencakup penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi. (3) Sub Urusan Sengketa Tanah Garapan, Kewenangan Provinsi mencakup Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah provinsi. (4) Sub Urusan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Kewenangan Provinsi mencakup Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi. (5) Sub Urusan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*, Kewenangan

Provinsi mencakup Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. (6) Sub Urusan Tanah Ulayat, Kewenangan Provinsi mencakup Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. (7) Sub Urusan Tanah Kosong, Kewenangan Provinsi mencakup Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi (8) Sub Urusan Penggunaan Tanah, Kewenangan Provinsi mencakup Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang masing-masing ditetapkan oleh setiap instansi yang ada. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal terpenting bahwa Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria SMART yaitu Spesifik (*Specific*), Dapat Diukur (*Measurable*), Dapat Dicapai (*Achievable*), Relevan (*Relevance*), dan Sesuai dengan Kurun Waktu Tertentu (*Timebound*).

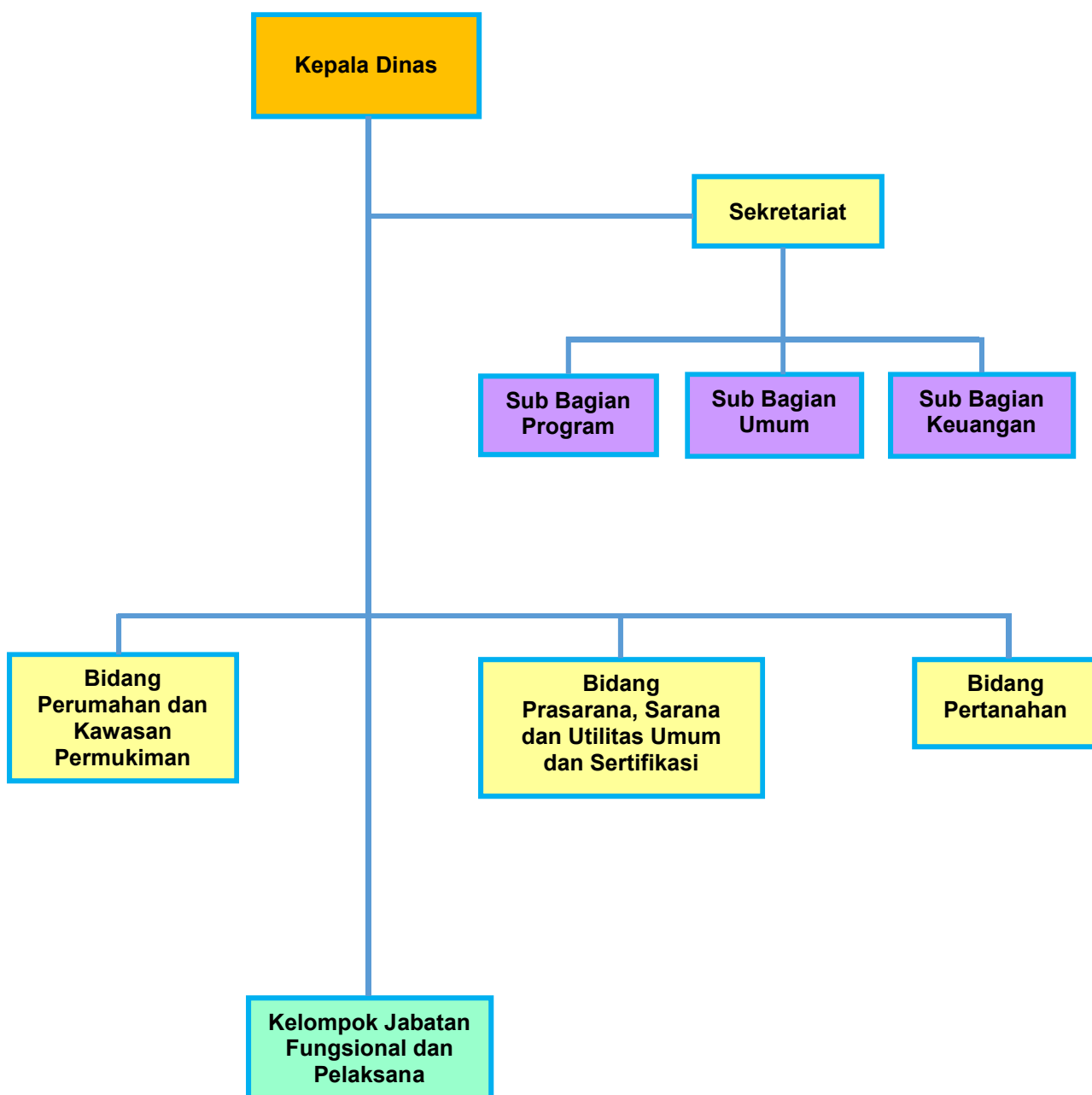
## **Struktur Organisasi**

Susunan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, meliputi :
  - 1) Sub Bagian Program
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Sertifikasi;
- e. Bidang Pertanahan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lembaga yang memegang peranan sangat penting dalam penyelenggaraan urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar 1.1

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**



## Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 93 orang. Berdasarkan umur lebih didominasi umur diatas 50 tahun sebanyak 34 orang (46,23%) artinya ke depan perlu penambahan pegawai baru.

Menurut Golongan Jabatan lebih didominasi golongan III sebanyak 66 orang (70,96%) hal ini sejalan dengan umur pegawai.

Menurut Pendidikan lebih didominasi tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 48 orang (51,61%) dan dibarengi dengan tingkat pendidikan magister (S2) sebanyak 30 orang (32,25%) artinya memiliki potensi yang cukup besar untuk pemanfaatan SDM dalam menjalankan tupoksi.

Menurut Peta Jabatan, jabatan struktural sebanyak 9 jabatan dan telah terisi, jabatan fungsional tertentu yang terisi sebanyak 11 Orang Pejabat, sehingga ke depan diharapkan jabatan fungsional lebih dioptimalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam melaksanakan tupoksi.

Menurut Jenis Kelamin lebih didominasi jenis kelamin laki-laki sebanyak 50 orang (53,76%). Potensi SDM Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 1 sampai dengan tabel 5.

**Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur**

No	Sekretariat/Bidang	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1.	Sekretariat	-	3	2	10	4	2	10	31
2.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	5	2	3	2	6	7	25
3.	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Sertifikasi	-	-	2	3	4	4	9	22
4.	Bidang Pertanahan	-	-	1	-	1	1	7	10
5.	UPTD Pengelolaan Rumah Susun	-	-	2	-	1	1	1	5
Total		-	8	9	16	12	14	34	93

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

**Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan**

No	Sekretariat/Bidang	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat	-	1	24	6	31
2.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	18	7	25
3.	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Sertifikasi	-	1	14	7	22
4.	Bidang Pertanahan	-	1	6	3	10
5.	UPTD Pengelolaan Rumah Susun	-	-	4	1	5
Total		-	3	66	24	93

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

**Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

No	Sekretariat/Bidang/UPT	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1.	Sekretariat	-	4	5	13	9	-	31
2.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	1	15	9	-	25
3.	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	-	2	-	14	6	-	22
4.	Bidang Pertanahan	-	3	-	2	5	-	10
5.	UPTD Pengelolaan Rumah Susun	-	-	-	4	1	-	5
Total		-	9	6	48	30	-	93

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

**Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	3
4.	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	11
5.	Pelaksana (Staf)	74
Jumlah		93

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

**Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1.	Eselon II	-	1	1
2.	Eselon III	1	3	4
3.	Eselon IV	1	2	3
5.	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	4	7	11
6.	Pelaksana (Staf)	37	37	74
Total		43	50	93

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

### Prasarana dan Sarana

Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan menempati Gedung Perkantoran seluas 600 M2 dan asset seluas 31.275 M<sup>2</sup>. Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tupoksi pelayanan berupa peralatan dan asset keseluruhan tercatat sejumlah Rp. 402.084.770.247,48. Alat angkutan darat roda 4 sebanyak 14 unit dengan uraian 12 unit dalam kondisi baik dan 2 unit dalam kondisi rusak berat. Alat angkutan darat roda 3 sebanyak 6 Unit, semua dalam kondisi baik. Alat angkutan darat roda 2 sebanyak 8 unit, semua dalam kondisi baik. Alat kantor dan rumah tangga sebanyak 1.614 unit dengan uraian 1.017 unit dalam kondisi baik dan 597 unit dalam kondisi rusak berat, dimana kondisi rusak berat menjadi perhatian untuk perbaikannya. Data sarana dan prasarana yang dikelola Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6. Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dikelola**

No	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1.	Alat Angkutan Darat Roda Empat	12	-	2	14
2.	Alat Angkutan Darat Roda Tiga	6	-	-	6
3.	Alat Angkutan Darat Roda Dua	8	-	-	8
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.017	-	597	1.614
Total		1.043	-	599	1.642

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

## 1.2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang akan dicapai di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah (1) Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi (SPM), (2) Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan Permukiman (Prioritas), (3) Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak, (4) Meningkatnya kualitas pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, (5) Meningkatnya kualitas pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

## 1.3. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Identifikasi Permasalahan utama berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan :

- a. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Belum optimalnya fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi.
- c. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertangani kewenangan provinsi.
- d. Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan persampahan, jalan lingkungan, drainase lingkungan dan sanitasi di kawasan permukiman.
- e. Belum ada penetapan lokasi kawasan permukiman yang menjadi kewenangan provinsi.
- f. Masih minimnya penyelesaian kasus tanah negara.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah:

**“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”.**

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok Visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 7

Berdasarkan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 tersebut di atas, Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sangat terkait dalam pencapaian Visi pembangunan daerah.

Ada 3 Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diampuh oleh Disperkimtan meliputi:

- 1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
- 2) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan *Aksesibel*;
- 3) Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif.

Misi 1, Misi 2 dan Misi 3 yang terkait dengan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai upaya untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel serta merata dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka direkomendasikan untuk penambahan Tujuan/Sasaran untuk dituangkan dalam IKU dan untuk mengokomodir program yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

1. Tujuan Jangka Menengah Daerah adalah sebagai berikut :
  - a. Pencapaian SPM Bidang Perumahan.
  - b. Meningkatkan pemerataan infrastruktur PSU kawasan permukiman.

- c. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
  - d. Meningkatkan mutu, kompetensi dan legalitas pengembang perumahan dan kawasan permukiman.
  - e. Meningkatkan legalitas dan kualitas pengadaan tanah bagi kepentingan umum.
2. Sasaran Jangka Menengah Daerah adalah sebagai berikut :
  - a. Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi
  - b. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman
  - c. Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak.
  - d. Meningkatnya kualitas pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan Kawasan permukiman.
  - e. Meningkatnya kualitas pengadaan tanah bagi kepentingan umum.
3. Strategi yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut.
  - a. Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi dalam Penyediaan Rumah Layak Huni.
  - b. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur PSU kawasan permukiman dengan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman.
  - c. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur kawasan permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
4. Arah Kebijakan pembangunan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :
  - a. Penyediaan Rumah Layak Huni dan Penunjangnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Akibat Bencana Skala Provinsi atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi.
  - b. Penyediaan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Penyediaan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman dan Layak.

- c. Penataan dan Peningkatan Kualitas Hunian Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Khususnya pada Kawasan Permukiman Kumuh.

#### A. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dibidang infrastruktur bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Keterkaitan Sasaran dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 7. Keterkaitan Antara Sasaran dan Indikator Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100%
Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terbangun di Kawasan Permukiman	100%
Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang tertata kewenangan provinsi	36,37%

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembang Perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum	Persentase pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	85 (A)
	Persentase Temuan Material	0%

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 seperti terlihat pada tabel 8.

**Tabel 8. Keterkaitan Antara Sasaran dan Indikator Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terbangun di Kawasan Permukiman	100%
3	Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertata kewenangan provinsi (Prioritas)	36,37%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembang Perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum	Persentase pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	85 (A)
		Persentase Temuan Material	0%

### 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Disperkimtan Provinsi Sulsel telah melakukan perubahan kedua terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan dari hasil evaluasi dari Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi yang merekomendasikan untuk penambahan sasaran pada level perjanjian kinerja eselon 2 untuk mengakomodir semua program yang akan dituangkan kedalam perjanjian kinerja eselon 2. Perjanjian kinerja eselon 2 harus disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga dipandang perlu untuk melakukan perubahan kedua Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mensinkronkan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Eselon 2. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

**Tabel 9. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN
1	Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100 %
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	Jumlah rumah tangga terkena relokasi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni/ Jumlah rumah tangga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi x 100 %
2	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terbangun di Kawasan Permukiman	%	Jumlah Kawasan Permukiman yang terbangun PSU pada tahun n / Target jumlah kawasan permukiman pada tahun n x 100%
3	Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertata kewenangan provinsi	%	luas kawasan kumuh 10-15 ha yang tertata / luas kawasan kumuh 10-15 ha kewenangan provinsi x 100%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembang Perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	Jumlah Pengembang Perumahan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi sampai dengan tahun n / Target jumlah pengembang perumahan tingkat kualifikasi menengah sampai dengan akhir Renstra x 100%
5	Meningkatnya kualitas pengadaan tanah bagi kepentingan umum	Persentase pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi kepentingan umum yang selesai tepat waktu / Target jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi kepentingan umum pada tahun n x 100%

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan PermenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan Akuntabilitas Kinerja atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja maka diberlakukan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

*Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 6 Sasaran Strategis. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran dapat dilihat berdasarkan target kinerja sasaran yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 10 berikut :

**Tabel 10. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2023**

**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	85 (A)	80,80* (A)	95,05%
		Persentase Temuan Material	0%	0%	100%

2	Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%	100%	100%
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100%	100%	100%
2	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terbangun di Kawasan Permukiman	100%	76,47%	76,47%
3	Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertata kewenangan provinsi	36,37%	27,01%	74,26%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembang Perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas pengadaan tanah bagi kepentingan umum	Persentase pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%	100%	100%
<b>Rata-rata % Capaian</b>					<b>93,22%</b>

*\*data sementara*

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rata rata capaian kinerja sasaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencapai 93,22% dengan kriteria sangat tinggi.

**A. Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah**

**1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah di dukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu nilai Sakip OPD dan Persentase Temuan Material. Secara lebih rinci pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang mendukung sasaran 1 (satu) pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di 11 dibawah ini :

**Tabel 11.**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI*	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	-	85	80,80*	95,05*
		Persentase Temuan Material	%	0	0	100
<b>Rata-rata</b>						<b>97,52</b>

\*data sementara

Adapun uraian terhadap 2 (dua) indikator yang mendukung kinerja sasaran 1 (satu) sebagai berikut :

- a. Indikator Nilai Sakip OPD ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 85 (A). Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator nilai SAKIP OPD diambil dari data nilai Sakip Tahun 2022 (data sementara) karena nilai Sakip tahun 2023 belum ditetapkan. Data sementara realisasi Nilai Sakip sebesar 80,80 (A) dengan perbandingan antara realisasi dibandingkan dengan target yang artinya capaian kinerja mencapai 95,05 % dengan kriteria sangat tinggi.
- b. Indikator Persentase Temuan Material pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 0% dengan realiasi sebesar 0% dikarenakan semua temuan LHP baik temuan material maupun temuan administrasi ditahun 2023 telah ditindaklanjuti artinya pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan sebesar 100% dengan kriteria sangat tinggi.

## **2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir**

Realisasi dan Capaian kinerja sasaran 1 untuk tahun 2023 pada 2 indikator diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Nilai Sakip OPD, realisasi kinerja nilai Sakip pada tahun 2023 masih menggunakan nilai sakip Tahun 2022 sebesar 80,80 (data sementara) dari target 85 artinya capaian kinerjanya sebesar 95,05 %. Hal ini disebabkan karena penilaian sakip untuk tahun 2023 belum ditetapkan. Realisasi Nilai Sakip pada tahun 2019 sebesar 70,23 dan nilai sakip tahun 2020 naik menjadi 75,30 artinya terjadi kenaikan sebesar 5,07%. Realisasi nilai sakip pada tahun 2021 sebesar 80,05 dan jika dibandingkan dengan nilai sakip tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,75%. Realisasi nilai sakip pada tahun 2022 sebesar 80,80 dan bila dibandingkan dengan nilai sakip tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,75%. Bila dilihat dari realisasi indikator kinerja nilai sakip dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami kenaikan, walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini berarti penerapan sakip sudah berjalan dengan sangat baik di Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Indikator Kinerja Persentase Temuan Material dari tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai target yang ditetapkan sebesar 0% artinya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terkait temuan baik material maupun administrasi semuanya telah ditindak lanjuti sehingga capaian indikator capaian kinerja 100% sama dengan tahun 2021 dan 2022. Sedangkan untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 belum dilakukan pengukuran kinerja karena masih menggunakan indikator lama yang tidak tertuang dalam dokumen renstra dinas tahun 2018-2023.

Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 12.

**Tabel 12.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Sakip OPD	70,23	75,30	80,05	80,80	85	80,80*	95,05
2	Persentase Temuan Material	-	-	0%	0%	0%	0%	100

\*data sementara

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Capaian kinerja sasaran 1 untuk tahun 2023 pada 2 indikator diuraikan sebagai berikut :

- a. Realisasi Indikator Kinerja Nilai sakip OPD pada tahun 2019 adalah 70,23 (B) dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang tertuang dalam renstra sebesar 85 maka capain kinerja nilai sakip pada tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD sebesar 82,62%. Pada tahun 2020 realisasi nilai sakip OPD adalah 75,30 (BB) dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang tertuang dalam renstra sebesar 85 maka capain kinerja nilai sakip pada tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD Tahun sebesar 88,58%. Pada tahun 2021 realisasi nilai sakip OPD adalah 80,05 dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang tertuang dalam renstra sebesar 85 maka capain kinerja nilai sakip pada tahun 2021 terhadap target akhir RPJMD sebesar 94,17%. Pada tahun 2022 realisasi nilai sakip OPD sebesar 80,80 dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang tertuang dalam renstra sebesar 85 maka capain kinerja nilai sakip pada tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 95,05%. Pada tahun 2023 yang merupakan akhir periode RPJMD dan Renstra, nilai sakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi masih menggunakan nilai sakip tahun 2022 sebesar 80,80. Hal ini dikarenakan penilaian sakip tahun 2023 yang belum ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang tertuang dalam dokumen renstra dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan prov.

Sulsel sebesar 85 maka diperoleh capaian kinerja nilai saki dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan prov. Sulsel pada tahun 2023 sebesar 95,05 %. Hal ini menunjukkan penerapan SAKIP sudah berjalan dengan sangat baik di Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan.

- b. Pengukuran indikator kinerja Persentase Temuan Material pada tahun 2019 sampai tahun 2020 belum dilakukan pengukuran karena masih menggunakan indikator lama yang tidak tertuang dalam renstra dinas tahun 2018-2023. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 indikator kinerja Persentase Temuan Material telah sesuai pencapaian target pada Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Ini menunjukkan bahwa semua temuan baik material maupun administrasi yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan telah ditindaklanjuti.

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 13.

**Tabel 13.**

**Realisasi dan Capaian Kinerja 2023 terhadap Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		Target Akhir RPJMD Tahun 2023		
		Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Saki OPD	70,23	82,62	75,30	88,58	80,05	94,17	80,80	95,05	85	80,80*	95,05
2	Persentase Temuan Material	-	-	-	-	0%	100	0%	100	0%	0%	100

\* data sementara

**4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan**

Dalam pencapaian target kinerja tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi Penghambat kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel pada akhir periode Renstra, antara lain :

- a. Belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghambat pencapaian kinerja yang maksimal.
- b. Indikator kinerja nilai saki opd yang mendukung pencapaian sasaran 1 di akhir periode renstra yang terlalu tinggi tanpa memperhatikan capaian

kinerja sebelumnya sehingga target yang ditetapkan pada akhir periode renstra sulit dicapai.

Meskipun dengan adanya faktor penghambat kinerja tersebut diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel tetap dapat memperoleh capaian kinerja yang sangat baik. Adapun faktor pendorong keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2023 antara lain :

- a. Besarnya komitmen pimpinan untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan yang matang dan fokus dalam pencapaian target kinerja;
- c. Meningkatnya pemahaman pejabat struktural dan fungsional serta staf tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Adanya Standar Operasional Prosedur (SoP) berbasis Sub Bagian, Sub Bidang dan Seksi di Lingkup Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. Kinerja telah dijabarkan (cascading) ke dalam kinerja setiap level jabatan dan staf;
- f. Tingginya minat SDM saat ini untuk memahami kinerja dan implementasinya;
- g. Dibentuk Tim Perencana dimasing-masing Bidang dan UPT Rumah Susun.
- h. Melaksanakan Inhouse Training Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel dalam rangka peningkatkan kinerja, Disiplin dan Etos Kerja Pegawai.
- i. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang bertujuan untuk menyampaikan rancangan awal Renstra dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan, memperoleh masukan terkait indikator, target kinerja program dan kegiatan serta menyelaraskan program kegiatan dengan dengan mitra OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan infrastruktur dan juga OPD Kab/Kota yang terkait dengan perumahan dan permukiman.
- j. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Tahun 2024 dengan mengundang mitra OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan infrastruktur dan juga OPD Kab/Kota yang terkait dengan perumahan dan permukiman. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan antar perangkat daerah

dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

- k. Melaksanakan Inhouse Training terkait penajaman indikator program dan kegiatan yang akan dituangkan ke dalam renstra dinas perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan prov. Sulsel Tahun 2024-2026 dengan mengundang pemateri dari Bappelitbangda Prov. Sulsel.
- l. Melakukan pengumpulan data kinerja dari bidang teknis terkait capaian program dan kegiatan setiap triwulannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mengetahui hambatan pelaksanaan program dan kegiatan.
- m. Melakukan tindak lanjut atas temuan inspektorat terkait LHP baik temuan administrasi maupun yang non administrasi.



**Gambar 1.2**

- a). In House Training Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Lingkup Disperkimtan**
- b). In House Training Penajaman Indikator Renstra Disperkimtan Tahun 2024-2026**

Solusi untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2023, yaitu :

- a. Melakukan Evaluasi Program dan Kegiatan secara berkala setiap Triwulan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait capaian kinerja program dan kegiatan tahun berjalan serta mengungkap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut.
- b. Melakukan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat secara tepat waktu.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja sasaran 1 yaitu nilai sakip opd sebesar 95,05% (data sementara) dan persentase temuan material dengan capaian 100%. Yang mendukung pencapaian sasaran 1 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 16.915.407.200,- realisasi anggaran sebesar Rp. 14.997.169,208,- dengan persentase 88,66%. Kurangnya persentase realisasi anggaran disebabkan karena beberapa item pekerjaan yang terdapat pada program penunjang urusan pemerintah daerah tidak terbayarkan dan berpotensi menjadi hutang.

Berdasarkan hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja pada Sasaran 1 dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena persentase capaian kinerja sasaran menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan anggaran. Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya pada sasaran 1 sebesar 8,86%. Hal ini tidak lepas dari tingginya capaian indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 97,52%. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dapat dilihat pada Tabel 14.

**Tabel 14.**

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1**

Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 7
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	95,05*	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.915.407.200	14.997.169.208	88,66	8,86 (Efisien)
	Persentase Temuan Material	100%					
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>		<b>97,52</b>				<b>88,66</b>	<b>8,86</b>

\*data sementara

## 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 1 yaitu :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** yang terdiri dari 7 (Tujuh) Kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu terealisasi sebesar 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target kinerja persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu terealisasi sebesar 100%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target kinerja jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan realisasi 4 laporan.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target kinerja jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan realisasi 1 laporan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target kinerja jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah dengan realisasi 1 laporan.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi 1 laporan.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan realisasi 1 laporan.

Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran 1 menunjukkan pencapaian kinerja yang sesuai target yang ditetapkan artinya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah sudah berjalan dengan sangat baik.

**B. Sasaran 2 Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi**

**1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Capaian kinerja sasaran 2 (dua) tahun 2023 di dukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) dan Indikator Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM). Secara lebih rinci pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang mendukung sasaran 2(dua) pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di 15 dibawah ini :

**Tabel 15.**

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100
<b>Rata-rata</b>						<b>100</b>

Adapun uraian terhadap 2 (dua) indikator yang mendukung kinerja sasaran 2 (dua) sebagai berikut :

- a. Indikator Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Adapun yang mendukung pencapaian terhadap Indikator Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), yaitu rehabilitasi rumah rumah

bagi korban bencana yang di targetkan sebanyak 17 unit rumah dan terealisasi sebanyak 17 unit rumah sehingga realisasi dan capaian kinerjanya mencapai 100%. Lokasi Rehabilitasi rumah bagi korban bencana berada di 2 kabupaten yaitu kabupaten luwu utara sebanyak 11 Unit dan kabupaten jenepono sebanyak 6 unit.

- b. Indikator persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) pada tahun 2023 sebesar 100% dan realiasi sebesar 100%. Adapun yang mendukung pencapaian terhadap indikator Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM) yaitu jumlah rumah tangga yang terkena relokasi sebanyak 17 dibandingkan dengan jumlah rumah tangga terkena relokasi yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni sebanyak 17 sehingga realisasi dan capaian kinerjanya mencapai 100%.

## **2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir**

Realiasi dan Capaian kinerja sasaran 2 untuk tahun 2023 pada 2 indikator diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) pada tahun 2019 capaian kinerjanya belum dapat dipenuhi karena belum adanya regulasi yang jelas terkait penanganan korban bencana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pada tahun 2020 di targetkan 100% dan terealisasi 100% yang diperoleh dari target rehabilitasi rumah rumah bagi korban bencana sebanyak 173 unit rumah dan terealisasi sebanyak 173 unit rumah sehingga realisasi dan capaian kinerjanya 100%. Pada tahun 2021 di targetkan 100% dan terealisasi 100% yang diperoleh dari target rehabilitasi rumah rumah bagi korban bencana sebanyak 72 unit rumah dan terealisasi sebanyak 72 unit rumah sehingga realisasi dan capaian kinerjanya 100%. Pada tahun 2022 di targetkan 100% dan terealisasi 100% yang diperoleh dari target rehabilitasi rumah rumah bagi korban bencana sebanyak 1.179 unit

rumah dan terealisasi sebanyak 1.179 unit rumah yang terdiri dari 44 unit rumah yang murni berasal Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dan 1.135 unit rumah yang berasal dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga realisasi dan capaian kinerjanya mencapai 100%. Pada tahun 2023 di targetkan 100% dan terealisasi 100% yang diperoleh dari target rehabilitasi rumah rumah bagi korban bencana sebanyak 17 unit rumah dan terealisasi sebanyak 17 unit rumah sehingga realisasi dan capaian kinerjanya mencapai 100%.

- b. Indikator Kinerja Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) pada tahun 2019 capaian kinerjanya belum dapat dipenuhi karena belum adanya regulasi yang jelas terkait relokasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan pencapaian kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022 sampai akhir periode RPJMD tahun 2023 selalu mencapai 100%, hal ini berarti penerapan SPM urusan perumahan telah berjalan dengan sangat baik di Sulawesi Selatan.

Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 16.

**Tabel 16.**

**Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100

**3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023**

Capaian kinerja sasaran 2 tahun 2023 pada 2 indikator diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) pada tahun 2019 capaian kerjanya belum dapat dipenuhi karena belum adanya regulasi yang jelas terkait penanganan korban bencana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Realisasi Indikator Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) pada tahun 2020 sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang tertuang dalam renstra sebesar 100% maka capain kinerja tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD sebesar 100%. Realisasi Indikator Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) pada tahun 2021 sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang tertuang dalam renstra sebesar 100% maka

capain kinerja tahun 2021 terhadap target akhir RPJMD sebesar 100%. Realisasi Indikator Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) pada tahun 2022 sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang tertuang dalam renstra sebesar 100% maka capain kinerja tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 100%. Realisasi Indikator Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) pada tahun 2023 sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang tertuang dalam renstra sebesar 100% maka capain kinerja tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target akhir RPJMD Tahun 2023 yang tertuang dalam renstra dinas telah tercapai.

- b. Indikator Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) pada tahun 2019 capaian kinerjanya belum dapat dipenuhi karena belum adanya regulasi yang jelas terkait relokasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Realisasi Indikator Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) pada tahun 2020 sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang tertuang dalam renstra sebesar 100% maka capain kinerja tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD sebesar 100%. Realisasi Indikator Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) pada tahun 2021 sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang tertuang dalam renstra sebesar 100% maka capain kinerja tahun 2021 terhadap target akhir RPJMD sebesar 100%. Realisasi Indikator Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) pada tahun 2022 sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang tertuang dalam renstra sebesar 100% maka capain kinerja tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 100%. Realisasi Indikator Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah

provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) pada tahun 2023 sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang tertuang dalam renstra sebesar 100% maka capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa pencapaian target akhir RPJMD Tahun 2023 yang tertuang dalam renstra dinas telah tercapai.

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 17.

**Tabel 17.**

**Realisasi dan Capaian Kinerja 2023 terhadap Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		Target Akhir RPJMD Tahun 2023		
		Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	-	-	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100%	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	-	-	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100%	100

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Adapun penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2023 antara lain :

- a. Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan kabupaten/kota berjalan dengan baik;

- b. Telah dilakukan sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan.
- c. Telah dilakukan sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana.
- d. Telah dilakukan penyusunan dokumen hasil identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah.
- e. Telah dilakukan pendataan rumah korban bencana berdasarkan tingkat kerusakan akibat bencana.
- f. Telah dilakukan pendataan terkait penerima rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang telah diverifikasi.
- g. Tersedianya dokumen DED rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi.
- h. Telah dilaksanakannya rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 17 Unit rumah yang tersebar di 2 kabupaten yang terdampak bencana, yaitu di kabupaten luwu utara sebanyak 11 Unit dan kabupaten jeneponto sebanyak 6 unit.



**Gambar 1.3**

- (a) Rehabilitasi rumah korban bencana di Kec. Tarowang Desa Tarowang Kab. Jeneponto,
- (b) Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Luwu Utara.

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2023, yaitu :

- a. Melakukan pendataan dan verifikasi terkait penerima rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah.
- b. Melakukan Rapat Koordinasi dengan kab/kota terkait percepatan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana.
- c. Melakukan Survey dan Penentuan Lokasi penerima rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi.
- d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk memantau progress pelaksanaan dan kualitas pekerjaan fisik terkait rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi.

## **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian Indikator Kinerja sasaran 2 yaitu Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) dengan capaian 100% dan Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) dengan capaian 100%. Program yang mendukung pencapaian sasaran 2 (dua) adalah Program Pengembangan Perumahan dengan anggaran Rp. 1.441.865.800,- realisasi anggaran sebesar Rp. 805.954.169,- dengan persentase 55,90%. Kurangnya persentase realisasi anggaran disebabkan karena lambatnya penetapan APBD perubahan sehingga beberapa kegiatan fisik tidak dapat terlaksana dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak mencukupi, Surat Penyediaan Dana untuk beberapa item pekerjaan yang terdapat pada program pengembangan perumahan yang tidak terbit sehingga tidak terbayarkan dan menjadi hutang.

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tergambar bahwa Pencapaian indikator kinerja pada Sasaran 2 dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, yaitu capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan anggaran. Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya pada sasaran 2 sebesar 2%. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18.

## Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2

Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 7
Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%	Pengembangan Perumahan	1.441.865.800	805.954.169	55,90	44,10 (Efisien)
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100%					
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>		<b>100</b>				<b>55,90</b>	<b>44,10</b>

#### 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 2 yaitu :

a. Program Pengembangan Perumahan yang terdiri dari 3 Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan target kinerja yaitu jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi terealisasi sebanyak 5 Dokumen.
2. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan target kinerja yaitu jumlah aparat yang memahami sosialisasi program

penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi terealisasi sebanyak 75 Orang.

3. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan target kinerja yaitu jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun terealisasi sebanyak 17 Unit rumah.

Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja sasaran 2 menunjukkan pencapaian kinerja sudah sesuai target yang ditetapkan artinya pencapaian target SPM urusan perumahan sudah sesuai target.

### **C. Sasaran 3 Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) permukiman.**

Berdasarkan hasil evaluasi tim SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan maka direkomendasikan untuk mengubah indikator sasaran agar lebih sinkron antara sasaran dan indikator sasaran. Adapun indikator sasaran sebelum evaluasi adalah "*Persentase rumah tangga yang berakses air minum layak di kawasan Pesisir dan Kepulauan*" dimana indikator tersebut tidak sejalan dengan sasaran yang terkait dengan peningkatan aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Dari hasil evaluasi tersebut maka indikator sasaran diubah menjadi "*Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terbangun di Kawasan Permukiman*".

#### **1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Capaian kinerja sasaran 3 tahun 2023 pada 1 indikator yaitu Persentase Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terbangun di Kawasan Permukiman. Adapun uraiannya sebagai berikut :

- a. Indikator Persentase Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terbangun di Kawasan Permukiman ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 76,47%. Ini diperoleh dari jumlah Kawasan permukiman yang terbangun PSU hanya terealisasi sebanyak 26 Kawasan dari target 34 kawasan. Tidak tercapainya target yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :
  - Adanya Refocusing anggaran yang mengakibatkan pencapaian kinerja menjadi tidak maksimal

- Belum adanya Regulasi yang jelas terkait Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan
  - Penetapan APBD Perubahan yang terlambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan fisik yang terkendala waktu sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
  - Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak terbayarkan dan menjadi hutang karena terkendala masalah administrasi.
- b. Adapun yang mendukung pencapaian sasaran 3 yaitu jumlah Kawasan permukiman yang terbangun PSU sebanyak 26 Kawasan. Diantaranya Pembangunan Teknologi Air Siap Minum (ARSINUM) di 11 (Sebelas) Kawasan yang tersebar di 7 kabupaten, yaitu kabupaten selayar sebanyak 4 kawasan, Kabupaten Sinjai sebanyak 1 Kawasan, Kabupaten Bulukumba sebanyak 1 Kawasan, Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 Kawasan, Kabupaten Maros sebanyak 1 Kawasan, Kabupaten Pangkep sebanyak 2 Kawasan, Kabupaten Pinrang sebanyak 1 Kawasan. Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 2.210,72 meter di 14 Kawasan yang tersebar 3 Kab/Kota, diantaranya Kota Makassar sebanyak 9 Kawasan, Kota Pare-Pare 1 Kawasan, Kabupaten Bone 4 Kawasan. Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 174,16 meter di 1 (satu) Kawasan yang berlokasi di Kota Makassar. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 19.

**Tabel 19. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terbangun di Kawasan Permukiman	%	100%	76,47%	76,47
<b>Rata-rata</b>						<b>76,47</b>

## 2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir

Realisasi dan Capaian kinerja sasaran 3 untuk tahun 2023 pada 1 indikator diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masih menggunakan Indikator Sasaran "*Persentase rumah tangga yang berakses air minum layak di Kawasan Pesisir dan Kepulauan*" yang diambil dari Perubahan Pertama IKU Disperkimtan Tahun 2018-2023. Pada tahun 2019 Realisasinya sebesar 2,84% sesuai target yang ditetapkan, dengan capaian kinerjanya sebesar 100%. Pada Tahun 2020 realisasinya sebesar 4,02% sesuai target yang ditetapkan dengan capaian kinerjanya sebesar 100%. Pada Tahun 2021 realisasinya sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan hasil evaluasi tim SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan Pada tahun 2022 maka dilakukan perubahan indikator sasaran untuk mensinkronkan antara sasaran dengan indikator sasaran. Adapun Indikator yang digunakan berdasarkan perubahan kedua IKU Disperkimtan Tahun 2018-2023 yaitu "*Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang terbangun dikawasan permukiman*". Pada tahun 2022 Realisasinya sebesar 100% yang diperoleh dari jumlah Kawasan permukiman yang terbangun PSU sebanyak 35 Kawasan dengan capaian sebesar 100%. Pada tahun 2023 Realisasinya sebesar 76,47% yang diperoleh dari jumlah Kawasan permukiman yang terbangun PSU sebanyak 26 Kawasan dari target 34 Kawasan dengan capaian sebesar 76,47%. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan capaian kinerja sasaran 3 pada tahun 2023 . Penurunan Capaian Kinerja pada tahun 2023 di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :
  - Adanya Refocusing anggaran yang mengakibatkan pencapaian kinerja menjadi tidak maksimal.
  - Belum adanya Regulasi yang jelas terkait Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan.

- Penetapan APBD Perubahan yang terlambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan fisik yang terkendala waktu sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak terbayarkan dan menjadi hutang karena terkendala masalah administrasi.

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 20.

**Tabel 20.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		
							Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase rumah tangga yang berakses air minum layak di kawasan pesisir dan kepulauan	-	2,84%	4,02%			Pengukuran Kinerja berdasarkan Perubahan Indikator Sasaran dari Perubahan Kedua IKU		
2	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terbangun di Kawasan Permukiman	Pengukuran Kinerja Masih Menggunakan Indikator Sasaran sebelum Perubahan Kedua IKU				100%	100%	100%	100

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Capaian kinerja sasaran 3 tahun 2022 pada 1 indikator diuraikan sebagai berikut :

- Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masih menggunakan Indikator Sasaran "*Persentase rumah tangga yang berakses air minum layak di Kawasan Pesisir dan Kepulauan*" yang diambil dari Perubahan Pertama IKU Disperkimtan Tahun 2018-2023. Pada tahun 2019 Realisasinya sebesar 2,84% sesuai target yang ditetapkan, dengan capaian kinerjanya sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah di akhir periode renstra maka persentase capaian kinerjanya sebesar 2,84%. Pada Tahun 2020 realisasinya sebesar

4,02% sesuai target yang ditetapkan dengan capaian kerjanya sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah di akhir periode renstra maka persentase capaian kerjanya sebesar 4,02%. Pada Tahun 2021 realisasinya sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah di akhir periode renstra maka persentase capaian kerjanya sebesar 100%. Berdasarkan hasil evaluasi tim SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan Pada tahun 2022 maka dilakukan perubahan indikator sasaran untuk mensinkronkan antara sasaran dengan indikator sasaran. Adapun Indikator yang digunakan berdasarkan perubahan kedua IKU Disperkimtan Tahun 2018-2023 yaitu "*Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang terbangun dikawasan permukiman*". Pada tahun 2022 Realisasinya sebesar 100% yang diperoleh dari jumlah Kawasan permukiman yang terbangun PSU sebanyak 35 Kawasan dengan capaian sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah di akhir periode renstra maka persentase capaian kerjanya sebesar 100% sesuai dengan target jangka menengah diakhir periode renstra. Pada tahun 2023 Realisasinya sebesar 76,47% yang diperoleh dari jumlah Kawasan permukiman yang terbangun PSU sebanyak 26 Kawasan dari target 34 Kawasan dengan capaian sebesar 76,47%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan trend kenaikan dan sudah sesuai dengan target jangka menengah di akhir periode renstra. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja yang tidak sesuai dengan target jangka menengah di akhir periode renstra. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- ❖ Adanya Refocusing anggaran yang mengakibatkan pencapaian kinerja menjadi tidak maksimal.
- ❖ Belum adanya Regulasi yang jelas terkait Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan.
- ❖ Penetapan APBD Perubahan yang terlambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan fisik yang terkendala waktu sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

- ❖ Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak terbayarkan dan menjadi hutang karena terkendala masalah administrasi.

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Disperkimtan Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 21 dibawah ini.

**Tabel 21.**

**Realisasi dan Capaian Kinerja 2023 terhadap Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		Target Akhir RPJMD Tahun 2023		
		Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase rumah tangga yang berakses air minum layak di kawasan pesisir dan kepulauan	2,84%	2,84	4,02%	4,02	100%	100	Pengukuran Kinerja berdasarkan Perubahan Indikator Sasaran dari Perubahan Kedua IKU		100%	Pengukuran Kinerja berdasarkan Perubahan Indikator Sasaran dari Perubahan Kedua IKU	
2	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terbangun di Kawasan Permukiman	Pengukuran Kinerja Masih Menggunakan Indikator Sasaran sebelum Perubahan Kedua IKU						100%	100	100%	76,47%	76,47

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Dalam Pelaksanaan pencapaian target kinerja pada sasaran 3 tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pecapaian kinerja, antara lain :

- Adanya Refocusing anggaran yang mengakibatkan pencapaian kinerja menjadi tidak maksimal.
- Belum adanya Regulasi yang jelas terkait Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan.

- c. Penetapan APBD Perubahan yang terlambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan fisik yang terkendala waktu sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- d. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak terbayarkan dan menjadi hutang karena terkendala masalah administrasi.

Meskipun dengan adanya faktor penghambat kinerja yang tersebut diatas, pencapaian sasaran 3 (tiga) tetap dapat memperoleh persentase capaian kinerja yang baik. Adapun faktor keberhasilan terhadap pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2023 antara lain :

- a. Tingginya perhatian pimpinan terhadap pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan permukiman;
- b. Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan kabupaten/kota berjalan dengan baik;
- c. Tersedianya data dan informasi terkait PSU Permukiman di kabupaten/kota;
- d. Telah Tersusunnya Rancangan Pergub tentang Penyelenggaraan PSU Kawasan Permukiman;
- e. Telah Tersosialisasinya Rancangan Pergub tentang Penyelenggaraan PSU Kawasan Permukiman;
- f. Tersedianya Dokumen Identifikasi Kebutuhan PSU Permukiman Kabupaten Bone;
- g. Tersedianya Dokumen Identifikasi Kebutuhan PSU Permukiman Kabupaten Maros;
- h. Tersedianya Dokumen Identifikasi Kebutuhan PSU Permukiman Kota Makassar;
- i. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan PSU Air bersih Layak/Arsinum yang menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan Teknologi Air Siap Minum (ARSINUM);
- j. Pembangunan Teknologi Air Siap Minum (ARSINUM) di 11 (Sebelas) Kawasan yang tersebar di 7 kabupaten, yaitu kabupaten selayar sebanyak 4 kawasan, Kabupaten Sinjai sebanyak 1 Kawasan, Kabupaten Bulukumba sebanyak 1 Kawasan, Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 Kawasan, Kabupaten Maros sebanyak 1 Kawasan, Kabupaten Pangkep sebanyak 2 Kawasan, Kabupaten Pinrang sebanyak 1 Kawasan;

- k. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman yang menjadi acuan dalam penentuan lokasi pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan kedepannya;
- l. Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 2.210,72 meter di 14 Kawasan yang tersebar 3 Kab/Kota, diantaranya Kota Makassar sebanyak 9 Kawasan, Kota Pare-Pare 1 Kawasan, Kabupaten Bone 4 Kawasan;
- m. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan drainase lingkungan yang menjadi acuan dalam penentuan lokasi pelaksanaan pembangunan drainase lingkungan kedepannya;
- n. Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 174,16 meter di 1 (satu) Kawasan yang berlokasi di Kota Makassar.



#### Gambar 1.4

- (a). Pembangunan Teknologi Air Siap Minum (ARSINUM) di Desa Karumpa Kab. Selayar
- (b). Pembangunan Jalan Lingkungan BTN Kodam 3 Kel. Katimbang Kota Makassar
- (c). Permbangunan Jalan Lingkungan Permukiman di Kel. Buakana Kota Makassar

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2023, yaitu :

- a. Melakukan pendataan terkait PSU Permukiman yang berada di Kab/Kota.
- b. Melakukan Koordinasi dengan Pemda kab/kota terkait pelaksanaan pembangun PSU Permukiman yang akan dilaksanakan.
- c. Melakukan Survey dan Penentuan Lokasi pembangunan PSU Permukiman.
- d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk memantau progress pelaksanaan pekerjaan dan kualitas pekerjaan fisik Pembangunan PSU Permukiman.

#### 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 yaitu Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terbangun di Kawasan Permukiman dengan capaian 76,47%. Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 (tiga) adalah Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum dengan anggaran sejumlah Rp.13.782.613,164,- realisasi anggaran sebesar Rp. 11.813.288.549,82,- dengan persentase sebesar 85,71%. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tergambar bahwa Pencapaian indikator kinerja pada Sasaran 3 dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dikarenakan capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih rendah daripada persentase realisasi penggunaan anggaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya :

- Belum adanya Regulasi yang jelas terkait Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan.
- Penetapan APBD Perubahan yang terlambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan fisik yang terkendala waktu sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

- Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak terbayarkan dan menjadi hutang karena terkendala masalah administrasi.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dapat dilihat pada Tabel 22.

**Tabel 22.**

**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3**

Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=3-7
Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terbangun di Kawasan Permukiman	76,47	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	13.782.613.164	11.813.288.549,82	85,71	-9,23 (Tidak Efisien)
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>		<b>76,47</b>				<b>85,71</b>	<b>-9,23</b>

**6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Sasaran 3 yaitu :

- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan :

- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan target kinerja yaitu jumlah PSU permukiman yang terbangun di Kawasan pesisir dan kepulauan sebanyak 34 Kawasan dan terealisasi sebanyak 26 Kawasan. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja yang tidak maksimal karena tidak mencapai target yang ditetapkan. Adapun yang menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja program dan kegiatan yaitu :

- Adanya Refocusing anggaran yang mengakibatkan pencapaian kinerja menjadi tidak maksimal.

- Belum adanya Regulasi yang jelas terkait Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan.
- Penetapan APBD Perubahan yang terlambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan fisik yang terkendala waktu sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak terbayarkan dan menjadi hutang karena terkendala masalah administrasi.

#### **D. Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak**

##### **1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Capaian kinerja sasaran 4 tahun 2023 pada 1 indikator yaitu Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertata kewenangan provinsi. Adapun uraiannya sebagai berikut :

- a. Indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertata kewenangan provinsi (Prioritas) ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 36,37% dan hanya terealisasi sebesar 27,01%. Hal ini berarti pencapaian kinerja hanya sebesar 74,26% dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target kinerja pada sasaran 4 disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya :
  - ❖ Adanya Refocusing anggaran yang mengakibatkan beberapa pekerjaan fisik tidak dapat dilaksanakan sehingga pencapaian kinerja menjadi tidak maksimal.
  - ❖ Penetapan APBD Perubahan yang terlambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan fisik yang terkendala waktu sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
  - ❖ Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak terbayarkan dan menjadi hutang karena terkendala masalah administrasi.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 23.

**Tabel 23.****Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertata kewenangan provinsi	%	36,37%	27,01%	74,26
<b>Rata-rata</b>						<b>74,26</b>

## 2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir

Realisasi dan Capaian kinerja sasaran 4 untuk tahun 2023 pada 1 indikator diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 2023 realisasi Indikator Kinerja Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertata kewenangan provinsi hanya mencapai 27,01% dari 36,37% target yang ditetapkan. Adapun Capaian kerjanya hanya sebesar 74,26%. Ini diperoleh dari luas Kawasan kumuh yang tertangani sebesar 319,72 Ha dibandingkan dengan luas Kawasan kumuh kewenangan provinsi seluas 1.183,79 Ha. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 23,42% dan terealisasi sebesar 25,39% dengan capaian kinerja sebesar 108% melebihi target yang telah ditetapkan. Ini diperoleh dari luas Kawasan kumuh yang tertangani sebesar 300,52 Ha dibandingkan dengan luas Kawasan kumuh kewenangan provinsi seluas 1.183,79 Ha. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 13,69% dan terealisasi sebesar 18,03% dengan capaian kinerja sebesar 131% melebihi target yang ditetapkan. Ini diperoleh dari luas Kawasan kumuh yang tertangani sebesar 213,46 Ha dibandingkan dengan luas Kawasan kumuh kewenangan provinsi seluas 1.183,79 Ha. Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 6,46% dan terealisasi sebesar 6,46% dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Ini diperoleh dari luas Kawasan kumuh yang tertangani sebesar 76,53 Ha dibandingkan dengan luas Kawasan kumuh kewenangan provinsi

seluas 1.183,79 Ha. Pada Tahun 2019 parameternya masih menggunakan perhitungan luas Kawasan kumuh seluas 4.157,53 Ha dibandingkan luas Kawasan kumuh tertangani seluas 1.657,83 Ha dengan realisasi sebesar 39,88%. Hal ini dikarenakan belum ditetapkannya peraturan Gubernur tentang lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan dan baru ditetapkan pada tahun 2020 yaitu Peraturan Gubernur Nomor 956/III/Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 1.183,79 ha. Kesimpulannya bahwa Penangan kawasan kumuh berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi baru dimulai pada tahun 2020 sampai dengan akhir periode Renstra pada tahun 2023. Realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami kenaikan walaupun pada tahun 2023 yang merupakan akhir periode renstra tidak mencapai target yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

- Adanya Refocusing anggaran yang mengakibatkan beberapa pekerjaan fisik tidak dapat dilaksanakan sehingga pencapaian kinerja menjadi tidak maksimal.
- Penetapan APBD Perubahan yang terlambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan fisik yang terkendala waktu sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak terbayarkan dan menjadi hutang karena terkendala masalah administrasi.

Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 24.

**Tabel 24.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertata kewenangan provinsi	39,88%	6,46%	18,03%	25,39%	36,37%	27,01%	74,26

**3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023**

Capaian kinerja sasaran 4 tahun 2023 pada 1 indikator diuraikan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertata Kewenangan Provinsi Pada Tahun 2023 realisasinya hanya mencapai 27,01% dari target yang ditetapkan sebesar 36,37% dengan capaian kerjanya sebesar 74,26%. Ini diperoleh dari luas Kawasan kumuh yang tertangani sebesar 319,72 Ha dibandingkan dengan luas Kawasan kumuh kewenangan provinsi seluas 1.183,79 Ha. Persentase capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir periode renstra sebesar 74,26%. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 23,42% dan terealisasi sebesar 25,39% dengan capaian kinerja sebesar 108% melebihi target yang telah ditetapkan. Ini diperoleh dari luas Kawasan kumuh yang tertangani sebesar 300,52 Ha dibandingkan dengan luas Kawasan kumuh kewenangan provinsi seluas 1.183,79. Persentase capaian kinerja tahun 2022 terhadap target akhir periode renstra sebesar 69,81%. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 13,69% dan terealisasi sebesar 18,03% dengan capaian kinerja sebesar 131% melebihi target yang ditetapkan. Ini diperoleh dari luas Kawasan kumuh yang tertangani sebesar 213,46 Ha dibandingkan dengan luas Kawasan kumuh kewenangan provinsi seluas 1.183,79 Ha. Persentase capaian kinerja tahun 2021 terhadap

target akhir periode renstra sebesar 49,57%. Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 6,46% dan terealisasi sebesar 6,46% dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Ini diperoleh dari luas Kawasan kumuh yang tertangani sebesar 76,53 Ha dibandingkan dengan luas Kawasan kumuh kewenangan provinsi seluas 1.183,79 Ha. Persentase capaian kinerja tahun 2020 terhadap target akhir periode renstra sebesar 17,76%. Pada Tahun 2019 parameternya masih menggunakan perhitungan luas Kawasan kumuh seluas 4.157,53 Ha dibandingkan luas Kawasan kumuh tertangani seluas 1.657,83 Ha dengan realisasi sebesar 39,88% sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan target akhir periode renstra. Artinya realisasi kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dengan perbandingan target akhir periode renstra selalu mengalami kenaikan walaupun pada tahun 2023 yang merupakan akhir periode target kinerjanya tidak dapat tercapai yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

- b. Adanya Refocusing anggaran yang mengakibatkan beberapa pekerjaan fisik tidak dapat dilaksanakan sehingga pencapaian kinerja menjadi tidak maksimal.
- c. Penetapan APBD Perubahan yang terlambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan fisik yang terkendala waktu sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- d. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak terbayarkan dan menjadi hutang karena terkendala masalah administrasi.

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 25.

**Tabel 25.**

**Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		Target Akhir RPJMD Tahun 2023		
		Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	39,88%	100	6,46%	17,76	18,03%	49,57	25,39%	69,81	36,37 %	27,01%	74,26

**4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan**

Dalam Pelaksanaan pencapaian target kinerja pada sasaran 4 tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja, antara lain :

- a. Adanya Refocusing anggaran yang mengakibatkan beberapa pekerjaan fisik tidak dapat dilaksanakan sehingga pencapaian kinerja menjadi tidak maksimal.
- b. Penetapan APBD Perubahan yang terlambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan fisik yang terkendala waktu sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- c. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak terbayarkan dan menjadi hutang karena terkendala masalah administrasi.

Meskipun dengan adanya faktor penghambat kinerja yang tersebut diatas, pencapaian sasaran 4 (empat) tetap dapat memperoleh persentase capaian kinerja yang baik. Adapun faktor keberhasilan terhadap pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2023 antara lain :

- a. Ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor Nomor 956/III/Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan kabupaten/kota berjalan dengan baik
- c. Tersedianya data dan informasi kawasan kumuh di kabupaten/kota.

- d. Telah dilaksanakannya Sosialisasi Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Kawasan Kumuh.
- e. Tersedianya Dokumen Detail Engineering Design Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten maros dan Kota Palopo.
- f. Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di 3 Kawasan, yaitu Kawasan Barranglompo yang berada di Kota Makassar, Kawasan Balitjas yang berada di Kab. Maros, Kawasan Seroja yang berada di Kab. Pinrang.
- g. Luas Kawasan Kumuh yang tertangani sampai dengan akhir tahun 2023 seluas 319,72 Ha dari 1.183,79 Ha total luas Kawasan kumuh kewenangan provinsi atau sebesar 27,01%.
- h. Infrastruktur yang terbangun pada Kawasan kumuh yaitu jalan lingkungan sepanjang 407,2 m, Drainase sepanjang 329,6 m.



**Gambar 1.5**

- a). Pembangunan RTLH di Pulau Barranglompo Kota Makassar
- b). Pembangunan Jalan Lingkungan di Pulau Barranglompo Kota Makassar
- c). Pembangunan Jaringan Drainase di Kab. Pinrang.

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2023, yaitu :

- a. Melakukan pemetaan dan pendataan terkait Kawasan Permukiman Kumuh yang menjadi Kewenangan Provinsi.
- b. Melakukan Koordinasi dengan Pemda kab/kota terkait Kawasan Permukiman Kumuh yang menjadi kewenangan provinsi dan juga melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan penanganan Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan di kab/kota.
- c. Melakukan Survey dan Penentuan Lokasi kegiatan Penanganan Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
- d. Membuat Time Schedule terkait kegiatan penangan kawasan kumuh agar pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.
- e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk memantau progress pelaksanaan pekerjaan dan kualitas pekerjaan fisik terkait penanganan kawasan kumuh kewenangan provinsi.

## **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 yaitu Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertata Kewenangan Provinsi sebesar 74,26% .Program yang mendukung pencapaian sasaran 4 (empat) adalah Program Kawasan Permukiman dengan anggaran sejumlah Rp. 3.630.970.400,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.376.328.823,- dengan persentase sebesar 37,91%. Kurangnya persentase realisasi anggaran disebabkan karena adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan beberapa pekerjaan fisik tidak dapat dilaksanakan sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal, penetapan APBD perubahan yang terlambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan fisik yang terkendala waktu sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak terbayarkan dan menjadi hutang.

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tergambar bahwa Pencapaian indikator kinerja pada Sasaran 4 dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, yaitu capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan anggaran. Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya pada sasaran 4 sebesar 36,32%.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dapat dilihat pada Tabel 26.

**Tabel 26. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4**

Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=3-7
Meningkat Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang layak	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertata Kewenangan Provinsi	74,26	Program Kawasan Permukiman	3.630.970.400	1.376.328.823	37,91	36,32 (Efisien)
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>		<b>74,26</b>				<b>37,91</b>	<b>36,32</b>

## 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran 4 yaitu :

- a. Program Kawasan Permukiman terdiri dari 2 (dua) kegiatan :
  1. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha dengan target kinerja jumlah dokumen penataan Kawasan permukiman kumuh sebanyak 1 dokumen dan realisasi sebanyak 1 dokumen.
  2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan target kinerja luas Kawasan kumuh tertangani 19,2 Ha dan realisasi 19,2 Ha.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan, artinya pencapaian target penanganan kawasan kumuh telah berjalan dengan baik di Sulawesi Selatan.

#### **E. Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan maka direkomendasikan untuk penambahan sasaran dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas (Eselon 2) untuk mengampuh Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman.

##### **1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Capaian kinerja sasaran 5 tahun 2023 pada 1 indikator yaitu Persentase Pengembang Perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun uraiannya sebagai berikut :

- a. Indikator Pengembang Perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 100% dan realiasi sebesar 100% artinya pencapaian kinerja sebesar 100% dalam kategori sangat baik.

Capaian Kinerja yang telah dicapai adalah sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan melibatkan Asosiasi Pengembang Perumahan yaitu APERSI dan REI. Perolehan capaian kinerja sebesar 100% di Tahun 2023 diperoleh dari target jumlah pengembang perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi sampai akhir periode renstra sebanyak 35 Pengembang dan terealisasi sebanyak 35 Pengembang. Hal ini berarti realisasi kinerja tahun 2023 telah sesuai dengan target akhir periode renstra 2018-2023.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 27.

**Tabel 27. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan Kawasan permukiman	Persentase pengembang perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di bidang perumahan dan Kawasan permukiman	%	100%	100%	100
<b>Rata-rata</b>						<b>100</b>

**2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir**

Realisasi dan Capaian kinerja sasaran 5 untuk tahun 2023 pada 1 indikator diuraikan sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Persentase Pengembang Perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan Realisasinya sebesar 100% dengan capaian target kinerjanya sebesar 100%. Hal ini berarti realisasi kinerja tahun 2023 telah sesuai dengan target akhir periode renstra 2018-2023. Perolehan capaian kinerja sebesar 100% di Tahun 2023 diperoleh dari target jumlah pengembang perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi sampai akhir periode renstra sebanyak 35 Pengembang dan terealisasi sebanyak 35 Pengembang. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 57,14% dan terealisasi sebesar 57,14% dengan Capaian kinerja sebesar 100%. Perolehan capaian kinerja sebesar 100% di Tahun 2022 diperoleh dari target jumlah pengembang perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi sampai akhir periode renstra sebanyak 35 Pengembang dan terealisasi sebanyak 20 Pengembang. Pada Tahun 2021 masih belum tercantum pada level sasaran melainkan masih dalam level

indikator program namun tidak terlaksana sehingga realisasi dan capaian program tidak mencapai target dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur tentang sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan yang menjadi kewenangan provinsi. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 belum dilakukan pengukuran kinerja karena masih menggunakan nomenklatur yang lama sehingga tidak tercantum dalam target capaian kinerja.

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 28.

**Tabel 28.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pengembang perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di bidang perumahan dan Kawasan permukiman	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	-	57,14%	100%	100%	100%

### **3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023**

Capaian kinerja sasaran 5 tahun 2023 pada 1 indikator diuraikan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indikator Kinerja Persentase Pengembang Perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan Realisasinya sebesar 100% dengan capaian target kinerjanya sebesar 100%. Hal ini berarti realisasi kinerja tahun 2023 telah sesuai dengan target akhir periode renstra 2018-2023. Perolehan capaian kinerja sebesar 100% di Tahun 2023 diperoleh dari target jumlah pengembang perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi

sampai akhir periode renstra sebanyak 35 Pengembang dan terealisasi sebanyak 35 Pengembang. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 57,14% dan terealisasi sebesar 57,14% dengan Capaian kinerja sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra sudah mencapai 57,14%. Perolehan capaian kinerja sebesar 100% di Tahun 2022 diperoleh dari target jumlah pengembang perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi sampai akhir periode renstra sebanyak 35 Pengembang dan terealisasi sebanyak 20 Pengembang. Pada Tahun 2021 masih belum tercantum pada level sasaran melainkan masih dalam level indikator program namun tidak terlaksana sehingga realisasi dan capaian program tidak mencapai target dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur tentang sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan yang menjadi kewenangan provinsi. Pada tahun 2109 dan tahun 2020 belum dilakukan pengukuran kinerja karena masih menggunakan nomenklatur yang lama sehingga tidak tercantum dalam target capaian kinerja.

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 29.

**Tabel 29.**

**Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		Target Akhir RPJMD Tahun 2023		
		Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pengembang perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di bidang perumahan dan Kawasan permukiman	Belum dilakukan pengukuran		Belum dilakukan pengukuran		-	-	57,14%	57,14	100%	100%	100

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan**

Adapun penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2023 antara lain :

- a. Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan Asosiasi Pengembang Perumahan berjalan dengan baik;
- b. Tersedianya data dan informasi terkait pengembang perumahan di kabupaten/kota.
- c. Membuat Regulasi terkait Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan.
- d. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah dengan Kab/Kota.
- e. Melakukan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dengan stakeholder yang terkait serta pihak asosiasi pengembang perumahan mengenai teknis pelaksanaan penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah.
- f. Melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak asosiasi pengembang perumahan terkait penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah.



**Gambar 1.6**

**Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah dengan Kab/Kota**

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2023, yaitu :

- a. Regulasi yang jelas terkait Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan yang menjadi kewenangan provinsi.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak asosiasi pengembang perumahan terkait data pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah.
- c. Kolaborasi dengan pihak asosiasi pengembang perumahan terkait penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah.

#### **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Indikator Kinerja Sasaran 5 yaitu Persentase pengembang perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di bidang perumahan dan Kawasan permukiman dengan realisasi 100 % dan Capaian sebesar 100%. Program yang mendukung pencapaian sasaran 5 (Lima) adalah Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan anggaran Rp. 443.964.800,- realisasi anggaran sebesar Rp. 435.165.566,- dengan persentase 98,02%. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tergambar bahwa Pencapaian indikator kinerja pada Sasaran 5 dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, yaitu capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan anggaran. Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya pada sasaran 5 sebesar 1,98%. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dapat dilihat pada Tabel 30.

**Tabel 30. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5**

Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=3-7
Meningkatnya kualitas pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan Kawasan permukiman	Persentase Pengembang Perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	443.964.800	435.165.566	98,02	1,98 (Efisien)
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>		<b>100</b>				<b>98,02</b>	<b>1,98</b>

#### **6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran 5 yaitu :

- a. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman terdiri dari kegiatan :
  1. kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan parasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah dengan target kinerja jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU dengan target 15 pengembang dan terealisasi sebanyak 15 Pengembang.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan, artinya pencapaian target untuk Peningkatan

Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman telah berjalan dengan baik.

#### **F. Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum**

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan maka direkomendasikan untuk penambahan sasaran dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas (Eselon 2) untuk mengampuh Program Pada Urusan Pertanahan.

##### **1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Capaian kinerja sasaran 6 tahun 2023 pada 1 indikator yaitu Persentase pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu. Adapun uraiannya sebagai berikut :

- a. Indikator Persentase pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% artinya pencapaian kinerja sebesar 100% dalam kategori sangat baik. Capaian Kinerja sebesar 100% diperoleh dari jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tahun 2023 ditargetkan sebanyak 3 Lokasi dan terealisasi sebanyak 3 lokasi.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 31.

**Tabel 31.**

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pengadaan tanah bagi kepentingan umum	Persentase pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100%	100%	100
<b>Rata-rata</b>						<b>100</b>

**2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir**

Capaian kinerja sasaran 6 untuk tahun 2023 pada 1 indikator diuraikan sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Persentase pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% artinya pencapaian kinerja sebesar 100% dalam kategori sangat baik. Capaian Kinerja sebesar 100% diperoleh dari jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tahun 2023 ditargetkan sebanyak 3 Lokasi dan terealisasi sebanyak 3 lokasi sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Artinya pencapaian kinerja sebesar 100% dalam kategori sangat baik. Capaian Kinerja sebesar 100% diperoleh dari jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tahun 2022 ditargetkan sebanyak 6 Lokasi dan terealisasi sebanyak 6 lokasi sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 masih belum tercantum pada level sasaran melainkan masih dalam level indikator program dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100%. Capaian

Kinerja sebesar 100% diperoleh dari jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tahun 2021 ditargetkan sebanyak 3 Lokasi dan terealisasi sebanyak 3 lokasi sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 masih belum

- b. tercantum pada level sasaran melainkan masih dalam level indikator program dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100%. Capaian Kinerja sebesar 100% diperoleh dari jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tahun 2020 ditargetkan sebanyak 5 Lokasi dan terealisasi sebanyak 5 lokasi sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 masih belum tercantum pada level sasaran melainkan masih dalam level indikator kegiatan dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100%. Capaian Kinerja sebesar 100% diperoleh dari jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tahun 2019 ditargetkan sebanyak 1 Lokasi dan terealisasi sebanyak 1 lokasi sesuai target yang telah ditetapkan. Sebagai kesimpulan bahwa realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 32.

**Tabel 32.**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### **3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023**

Capaian kinerja sasaran 6 tahun 2023 pada 1 indikator diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Persentase pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra yaitu sebesar 100% maka capaian kinerjanya sebesar 100%. Artinya capaian kinerja pada tahun 2023 sudah mencapai target akhir periode renstra. Capaian Kinerja sebesar 100% diperoleh dari jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tahun 2023 ditargetkan sebanyak 3 Lokasi dan terealisasi sebanyak 3 lokasi sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Artinya pencapaian kinerja sebesar 100% dalam kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra yaitu sebesar 100% maka capaian kinerjanya sebesar 100%. Artinya capaian kinerja pada tahun 2022 sudah sesuai target renstra ditahun berjalan. Capaian Kinerja sebesar 100% diperoleh dari jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tahun 2022 ditargetkan sebanyak 6 Lokasi dan terealisasi sebanyak 6 lokasi sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 masih belum tercantum pada level sasaran melainkan masih dalam level indikator program dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra sebesar 100% maka capaian kinerja sebesar 100% dan sudah sesuai dengan target renstra tahun berjalan. Capaian Kinerja sebesar 100% diperoleh dari jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tahun 2021 ditargetkan sebanyak 3 Lokasi dan terealisasi sebanyak 3 lokasi sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 masih belum tercantum pada level sasaran melainkan masih dalam level indikator program dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100%. Jika

dibandingkan dengan target akhir periode renstra sebesar 100% maka capaian kinerja sebesar 100% dan sudah sesuai dengan target renstra tahun berjalan. Capaian Kinerja sebesar 100% diperoleh dari jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tahun 2020 ditargetkan sebanyak 5 Lokasi dan terealisasi sebanyak 5 lokasi sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 masih belum tercantum pada level sasaran melainkan masih dalam level indikator kegiatan dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra sebesar 100% maka capaian kinerja sebesar 100% dan sudah sesuai dengan target renstra tahun berjalan. Capaian Kinerja sebesar 100% diperoleh dari jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tahun 2019 ditargetkan sebanyak 1 lokasi dan terealisasi sebanyak 1 lokasi sesuai target yang telah ditetapkan. Sebagai kesimpulan bahwa realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 selalu mencapai target yang ditetapkan dan sudah sesuai target renstra pada tahun berjalan, sedangkan pada tahun 2023 realisasi dan capaiannya sudah mencapai target akhir periode renstra. ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pertanahan sudah terlaksana dengan baik.

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 33.

**Tabel 33.**

**Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		Target Akhir RPJMD Tahun 2023		
		Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100%	100

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Adapun penyebab keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja pada tahun 2023 antara lain :

- a. Tingginya perhatian dan komitmen pimpinan terhadap penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- b. Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan kabupaten/kota berjalan dengan baik;
- c. Tersedianya data dan informasi terkait pertanahan di kabupaten/kota.
- d. Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- e. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- f. Tersusunnya dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- g. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah sebanyak 3 Kasus.
- h. Fasilitasi Penetapan lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi kepentingan umum sebanyak 3 Lokasi, yaitu : Penetapan Lokasi Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa, Penetapan Lokasi Pembangunan overpass tonasa 2 di Kabupaten Pangkep dan Jalan Damai Ongkoe di Kabupaten Maros, Penetapan Lokasi Bandar Udara Bulukumba di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.





Gambar 1.7

- (a). Fasilitas Sengketa Tanah Bersama Komnas HAM,
- (b). Fasilitas Pengadaan Tanah Bendungan Jenelata Kab. Gowa,
- (c). Revisi Study Kelayakan dan Rencana Induk Bandar Udara Bulukumba
- (d). Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum

Solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan terhadap pencapaian target kinerja sasaran pada tahun 2023, yaitu :

- a. Di terbitkannya Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penetapan lokasi pembangun untuk kepentingan umum.
- b. Mengadakan Konsultasi Publik terkait pengadaan tanah dengan mengundang masyarakat yang tanahnya akan mejadi lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
- c. Pemberian Uang Ganti Kerugian atas Tanah masyarakat yang menjadi lokasi pembangun untuk kepentingan umum.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Sasaran 6 yaitu Persentase pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu dengan realisasi 100 % dan Capaian sebesar 100%. Program yang mendukung pencapaian sasaran 6 (Lima) sebanyak 3 (tiga) Program diantaranya adalah adalah Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan anggaran Rp.148.563.100,- realisasi anggaran sebesar Rp.143.157.000,- dengan persentase 96,36%. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan anggara Rp.147.584.200,- realisasi anggaran sebesar 136.644.100,- dengan persentase 92,59%. Program Penatagunaan Tanah dengan anggaran Rp. 335.671.400,- realisasi anggaran sebesar 317.055.275,- dengan

persentase 94,45%. Rata rata capaian realisasi anggaran dari 3 program yang mendukung pencapaian sasaran 6 sebesar 83,13%. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tergambar bahwa Pencapaian indikator kinerja pada Sasaran 6 dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, yaitu capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan anggaran. Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya pada sasaran 6 sebesar 5,54%. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dapat dilihat pada Tabel 34.

**Tabel 34.**

**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 6**

Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=3-7
Meningkatnya kualitas pengadaan tanah bagi kepentingan umum	Persentase pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	148.563.100	143.157.000	96,36	5,54 (Efisien)
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	147.584.200	136.644.100	92,59	
			Program Penatagunaan Tanah	335.671.400	317.055.275	94,45	
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>		<b>100</b>				<b>94,46</b>	<b>5,54</b>

**6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran 6 yaitu :

- a. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang terdiri dari kegiatan :

1. Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi dengan target kinerja jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan target sebanyak 3 (tiga) Lokasi dan terealisasi sebanyak 3 (tiga) Lokasi.
- b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang terdiri dari kegiatan :
  1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan target kinerja jumlah sengketa tanah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa tanah dengan target sebanyak 7(tujuh) Kasus dan terealisasi sebanyak 3 (tiga) Kasus.
- c. Program Penatagunaan Tanah yang terdiri dari kegiatan :
  1. Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan target 1 (satu) dokumen dan realisasi 1 (satu) dokumen.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja urusan pertanahan sudah berjalan dengan baik.

### **3.2. REALISASI ANGGARAN**

Pada Tahun 2023, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 301.578.000,- dari Retribusi Kamar Rumah Susun, Retribusi Kantin Umum, Retribusi Lahan ATM, Retribusi Lahan Taman Pakui Sayang. Realisasi PAD untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 311.255.440,- atau 103,21% melebihi target yang telah ditetapkan.

Anggaran Belanja Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan pada APBD tahun 2023 sebesar Rp. 36.846.640.064,- yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 36.632.179.284,- yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 12.567.833.722,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 24.064.345.562,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 214.460.780,-.

Realisasi Belanja Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 30.024.762.690,82,- (81,49%) dari total

anggaran belanja. Terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 29.941.522.690,82,- (81,74%) dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 83.240.000,- (38,81%).

Tidak maksimalnya realisasi anggaran belanja dispermintan disebabkan karena adanya refocusing anggaran, penetapan APBD perubahan yang terlambat sehingga mengakibatkan beberapa pekerjaan fisik yang tidak dapat dilaksanakan karena terkendala waktu yang sangat mepet yang berimbas pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal, selain daripada itu terdapat beberapa paket pekerjaan yang tidak dapat terbayarkan dan menjadi hutang.

Pendapatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran Keuangan dan Fisik Dispermintan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 1.

## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan dapat disimpulkan bahwa secara umum telah dapat memenuhi sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pencapaian kinerja yang sangat baik dari 6 (enam) sasaran yang mengampuh 8 (delapan) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) Sub Kegiatan pada APBD Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 93,22% dengan kriteria sangat baik, dapat dilihat dari tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	85	80,80*	95,05 %	Sangat Tinggi
		Persentase Temuan Material	0%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

3.	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terbangun di Kawasan Permukiman	100%	76,47%	76,47%	Tinggi
4.	Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertata Kewenangan Provinsi	36,37%	27,01%	74,26%	Sedang
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembang Perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum	Persentase pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>93,22%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

*Keterangan : \* data sementara*

Seluruh capaian kinerja yang telah dicapai, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2023, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja yang akan datang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dialog kinerja perangkat daerah dalam rangka perbaikan kualitas perencanaan dan peningkatan budaya kinerja dari level pimpinan sampai dengan staf.
- b. Lebih meningkatkan koordinasi antar bidang / UPTD dan Sekretariat di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan maupun dengan pemerintah dan kabupaten/kota.
- c. Mengoptimalkan potensi yang ada baik berupa SDM, Anggaran maupun kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut dapat lebih efektif dan efisien mewujudkan tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan.
- d. Lebih memperhatikan aspek keserasian, keselarasan, keseimbangan sesuai pola strategik, dalam implementasi rencana kinerja ke depan sehingga terdapat keseimbangan yang wajar atas pencapaian dari masing-masing tujuan strategik. Hal ini penting guna mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan.
- e. Lebih banyak melakukan sosialisasi kinerja kepada semua pejabat struktural dan staf sehingga pemahaman dan implementasi kinerja dapat berjalan dengan baik di lingkungan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Kepala Dinas,



Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES  
Pembina Utama Madya (IV.d)  
NIP. 19650531 199111 1 001



# LAMPIRAN



21 Jul 2023 09:53:14  
Jalan Veteran  
Desongan

## Lampiran 1. Pendapatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

### A. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan</b>			
	- Lahan Parkir Taman Pakui	1.738.000	1.738.000	100
	- Pemakaian Kamar Rusun	225.440.000	219.946.000	97,56
	- Pemakaian Kantin Umum	40.000.000	50.721.440	126,80
<b>2.</b>	<b>Retribusi Penyewaan Tanah</b>			
	- Retribusi Lahan ATM Bank Sulsel	14.400.000	14.400.000	100
<b>3.</b>	<b>Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga</b>			
	- Taman Pakui Sayang	20.000.000	24.450.000	122,25
	<b>JUMLAH</b>	<b>301.578.000</b>	<b>311.255.440</b>	<b>103,21</b>

### B. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN TASE (%)	SISA ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>36.846.640.064</b>	<b>30.024.762.690,82</b>	<b>81,49</b>	<b>6.821.877.373,18</b>
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>36.632.172.284</b>	<b>29.941.522.690,82</b>	<b>81,74</b>	<b>6.690.656.593,18</b>
	<b>Belanja Modal</b>	<b>214.460.780</b>	<b>83.240.000</b>	<b>38,81</b>	<b>131.220.780</b>
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>16.915.407.200</b>	<b>14.997.169.208</b>	<b>88,66</b>	<b>1.918.237.992</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>994.780.600</b>	<b>860.403.505</b>	<b>86,49</b>	<b>134.377.095</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	726.752.200	595.063.905	81,88	131.688.295
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40.998.000	40.472.000	98,72	526.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.740.200	8.196.000	93,77	544.200
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.536.300	3.752.100	82,71	784.200
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.232.200	3.428.000	81,00	804.200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	88.849.000	88.840.000	99,99	9.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.672.700	120.651.500	99,98	21.200
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.005.968.278</b>	<b>12.122.595.671</b>	<b>93,21</b>	<b>883.372.607</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.706.438.978	11.840.877.871	93,19	865.561.107
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.100.000	7.216.900	79,31	1.883.100

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	82.658.700	78.950.000	95,51	3.708.700
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	106.679.100	98.338.900	89,66	11.340.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.609.000	5.915.000	89,50	694.000
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	35.177.800	35.029.800	99,58	148.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.980.200	5.959.300	99,65	20.900
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50.324.500	50.307.900	99,97	16.600
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>255.605.500</b>	<b>184.560.300</b>	<b>72,21</b>	<b>71.045.200</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	32.188.000	31.213.600	96,97	974.400
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	152.031.300	86.409.900	56,84	65.621.400
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	71.386.200	66.936.800	93,77	4.449.400
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>420.508.400</b>	<b>379.096.798</b>	<b>90,15</b>	<b>41.411.602</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	81.910.000	70.200.000	85,70	11.710.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	126.601.800	120.955.100	95,54	5.646.700
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	92.722.000	92.676.000	99,95	46.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	119.274.600	95.265.698	79,87	24.008.902
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>346.996.780</b>	<b>262.919.000</b>	<b>75,77</b>	<b>84.077.780</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.808.000	44.747.000	97,68	1.061.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.094.250	135.751.000	71,04	55.343.250
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.042.030	5.408.500	53,86	4.633.530
Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.052.500	77.012.500	76,97	23.040.000
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>395.541.332</b>	<b>297.149.284</b>	<b>75,12</b>	<b>98.392.048</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	395.541.332	297.149.284	75,12	98.392.048
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.496.006.310</b>	<b>890.444.650</b>	<b>59,52</b>	<b>605.561.660</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	856.612.310	473.168.800	55,24	383.443.510
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.800.000	54.691.850	22,53	188.108.150

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	396.594.000	362.584.000	91,42	34.010.000
<b>2.</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>1.441.865.800</b>	<b>805.954.169</b>	<b>55,90</b>	<b>635.911.631</b>
	<b>Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>353.597.300</b>	<b>267.346.180</b>	<b>75,61</b>	<b>86.251.120</b>
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	107.665.500	81.553.500	75,75	26.112.000
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	60.530.000	50.198.580	82,93	10.331.420
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	52.081.500	43.391.700	83,31	8.689.800
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	63.420.000	62.373.500	98,35	1.046.500
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	69.900.300	29.828.900	42,67	40.071.400
	<b>Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>113.253.200</b>	<b>54.139.200</b>	<b>47,80</b>	<b>59.114.000</b>
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	20.017.200	9.061.500	45,27	10.955.700
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	44.060.400	16.687.400	37,87	27.373.000
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	10.672.000	1.458.700	13,67	9.213.300
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	2.259.400	1.797.000	79,53	462.400
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	21.285.600	13.142.600	61,74	8.143.000
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerimaan dan Jenis Pelayanan	14.958.600	11.992.000	80,17	2.966.600
	<b>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>975.015.300</b>	<b>484.468.789</b>	<b>49,69</b>	<b>490.546.511</b>
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	916.465.300	434.349.189	47,39	482.116.111
	Penyusunan Site Plan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	58.550.000	50.119.600	85,60	8.430.400
<b>3.</b>	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>3.630.970.400</b>	<b>1.376.328.823</b>	<b>37,91</b>	<b>2.254.641.577</b>
	<b>Kegiatan Penataa Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>243.259.100</b>	<b>208.289.580</b>	<b>85,62</b>	<b>34.969.520</b>

	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	29.455.400	25.517.100	86,63	3.938.300
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	147.881.800	137.236.180	92,80	10.645.620
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	65.921.900	45.536.300	69,08	20.385.600
	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>3.387.711.300</b>	<b>1.168.039.243</b>	<b>34,48</b>	<b>2.219.672.057</b>
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.593.437.800	279.642.500	17,55	1.313.795.300
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.794.273.500	888.396.743	49,51	905.876.757
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>13.782.613.164</b>	<b>11.813.288.549,82</b>	<b>85,71</b>	<b>1.969.324.614,18</b>
	<b>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>	<b>13.782.613.164</b>	<b>11.813.288.549,82</b>	<b>85,71</b>	<b>1.969.324.614,18</b>
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	498.780.200	490.314.040	98,30	8.466.160.
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	13.082.254.364	11.132.257.367,82	85,09	1.949.996.996,18
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	128.158.600	121.054.042	94,46	7.104.558
	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	73.420.000	69.663.100	94,88	3.756.900
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>443.964.800</b>	<b>435.165.566</b>	<b>98,02</b>	<b>8.799.234</b>
	<b>Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah</b>	<b>443.964.800</b>	<b>435.165.566</b>	<b>98,02</b>	<b>8.799.234</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	443.964.800	435.165.566	98,02	8.799.234

<b>6.</b>	<b>Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</b>	<b>148.563.100</b>	<b>143.157.000</b>	<b>96,36</b>	<b>5.406.100</b>
	<b>Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>	<b>148.563.100</b>	<b>143.157.000</b>	<b>96,36</b>	<b>5.406.100</b>
	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembanguna dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	148.563.100	143.157.000	96,36	5.406.100
<b>7.</b>	<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>147.584.200</b>	<b>136.644.100</b>	<b>92,59</b>	<b>10.940.100</b>
	<b>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>147.584.200</b>	<b>136.644.100</b>	<b>92,59</b>	<b>10.940.100</b>
	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50.964.300	45.346.300	88,98	5.618.000
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	96.619.900	91.297.800	94,49	5.322.100
<b>8.</b>	<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	<b>335.671.400</b>	<b>317.055.275</b>	<b>94,45</b>	<b>18.616.125</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>335.671.400</b>	<b>317.055.275</b>	<b>94,45</b>	<b>18.616.125</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	91.983.900	86.171.800	93,68	5.812.100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	243.687.500	230.883.475	94,75	12.804.025



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Andi Pangerang Petta Rani No.90 Kotak pos 552 Telp. 458489 MAKASSAR 90231

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. H. ANDI BAKTI HARUNI, CES**  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama,

Nama : **Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si**  
Jabatan : Pj. Gubernur Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Desember 2023

*h.* Pihak Kedua

Pihak Pertama

  
Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si

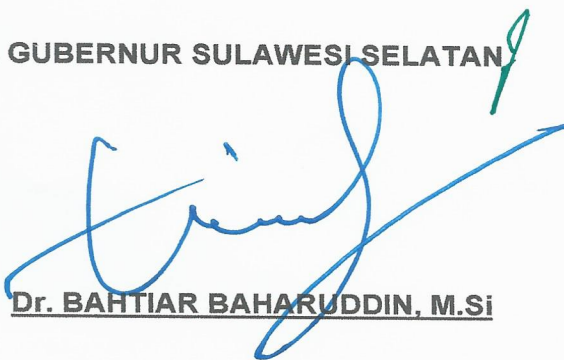
  
Ir. H. ANDI BAKTI HARUNI, CES  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip. 19650531 199111 1 001

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100%
2	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terbangun di Kawasan Permukiman	100%
3	Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang tertata kewenangan provinsi	36,37%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembang Perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%
5	Meningkatnya kualitas pengadaan tanah bagi kepentingan umum	Persentase pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	85 (A)
		Persentase Temuan Meterial	0%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.915.407.200	APBD PERUBAHAN
2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (SPM)	1.441.865.800	
3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM/PSU (PRIORITAS)	13.782.613.164	
4. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (PRIORITAS)	3.630.970.400	
5. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	148.563.100	
6. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	147.584.200	
7. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	335.671.400	
8. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	443.964.800	

Makassar, Desember 2023

**Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
  
**Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si**

**KEPALA DINAS**  
  
**Ir. H. ANDI BAKTI HARUNI, CES**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip. 19650531 199111 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan A. P. Petta Rani No.90 Makassar 90222 Telp. 0411-458489 Website:disperkimtan.sulselprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yosep Sulle, S.IP., M.Si**  
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES**  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya atasan Pihak Pertama disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Desember 2023

Pihak Kedua,

  
**Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19650531 199111 1 001

Pihak Pertama,

  
**Yosep Sulle, S.IP., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. 1  
NIP. 19660423 198703 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROV. SULSEL**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana kewenangan provinsi dan bagi warga negara yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi (SPM)	100 %
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM)	100 %
1.	Terlaksananya penyediaan rumah bagi korban bencana kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah daerah provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi	5 Dokumen
		Jumlah aparat yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	140 Orang
		Jumlah unit korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun	17 Unit
B.	Meningkatnya luas kawasan kumuh yang tertangani kewenangan provinsi	Persentase luas kawasan kumuh tertangani kewenangan provinsi	36,37 %
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas dan penataan kawasan kumuh kewenangan provinsi	Luas kawasan kumuh yang tertangani	19,2 Ha
		Jumlah dokumen penataan kawasan permukiman kumuh	1 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Rp. 5.072.836.200</b>	<b>APBD Perubahan</b>
<b>A. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Rp. 1.441.865.800</b>	<b>APBD Perubahan</b>
<b>1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokais Program Provinsi</b>	<b>Rp. 353.597.300</b>	
a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Rp. 107.665.500	
b. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Rp. 60.530.000	
c. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp. 52.081.500	
d. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Rp. 63.420.000	

e.	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Rp.	69.900.300	
<b>2.</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>Rp.</b>	<b>113.253.200</b>	
a.	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	Rp.	20.017.200	
b.	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp.	44.060.400	
c.	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Rp.	10.672.000	
d.	Pembentukan dan Pelantikan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Rp.	2.259.400	
e.	Rebug Warga untuk Penetapan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Rp.	21.285.600	
f.	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Rp.	14.958.600	
<b>3.</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>Rp.</b>	<b>975.015.300</b>	
a.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp.	916.465.300	
b.	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp.	58.550.000	
<b>B.</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.630.970.400</b>	<b>APBD Perubahan</b>
<b>1.</b>	<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha</b>	<b>Rp.</b>	<b>243.259.100</b>	
a.	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Kembangnya Permukiman Kumuh	Rp.	29.455.400	
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran / Peremajaan / Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Rp.	147.881.800	
c.	Koordinasi dan Sinkorinisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawsan Permukiman	Rp.	65.921.900	
<b>2.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh denga Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.387.711.300</b>	
a.	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran / Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Rp.	1.593.437.800	

- b. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan  
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai  
dengan di bawah 15 (lima belas) Ha

Rp. 1.794.273.500

Makassar, Desember 2023

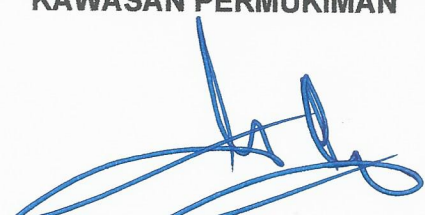
Pihak 2

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROV. SULSEL**

  
**Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19650531 199111 1 001

Pihak 1

**KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN**

  
**Yosep Sulle, S.IP., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. 1  
NIP. 19660423 198703 1 006



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
JALAN A. PANGERANG PETTA RANI NO.90 KOTAK TELP. (0411) 458489 MAKASSAR

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ishak Amin Rusly, S.T., M.T**

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Sertifikasi

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : **Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES**

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 8 Desember 2023

Pihak Kedua, 

Pihak Kesatu,

**Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES**

Pangkat : Pembina Utama Madya / IV.d

Nip. 19650531 199111 1 001

  
**Ishak Amin Rusly, S.T., M.T**

Pangkat : Pembina Tk. I / IV.b

Nip. 19720813 200212 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM KAWASAN PERMUKIMAN  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SUL-SEL**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Uulitas Umum (PSU) di Kawasan Permukiman Layak	Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	100%
		Persentase rumah tangga yang bersanitasi di kawasan permukiman	93%
		Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan pesisir dan kepulauan	100%
2	Meningkatnya kawasan permukiman yang tersedia PSU layak	Jumlah PSU Permukiman yang terbangun di kawasan pesisir dan	34 Kawasan
3	Meningkatnya Pengembang Perumahan dengan Tingkat Kualifikasi Menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%
4	Meningkatnya kualitas pengembang perumahan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan perumahan	Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan perumahan	15 Pengembang

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum ( PSU )	Rp 13,782,613,164	APBD PERUBAHAN
2. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Rp 13,782,613,164	
3. Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Rp 498,780,200	
4. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Rp 13,082,254,364	
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Rp 128,158,600	
6. Sub Kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Rp 73,420,000	
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 443,964,800	
8. Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Rp 443,964,800	
9. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Rp 443,964,800	

Makassar, 8 Desember 2023

Pihak Kedua  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES  
Pangkat : Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 19650531 199111 1 001

Pihak Kesatu  
**KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA  
UTILITAS UMUM DAN SERTIFIKASI**

Ishak Amin Rusly, ST., MT  
Pangkat : Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 19720813 200212 1 007



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
JALAN A. Pengerang Petta Rani No.90 Kotak Telp. (0411) 458489 Makassar

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fakhruddin, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES**

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Desember 2023

Pihak Kedua,

  
**Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES**  
Pangkat : Pembina Utama Madya/IV.d  
Nip. 19650531 199111 1 001

Pihak Pertama,

  
**Fakhruddin, SE, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b  
Nip. 19670904 199203 1 015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BIDANG PERTANAHAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SUL-SEL**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1			4
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan penggunaan tanah lintas daerah dalam 1 provinsi	Persentase Penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 Kab/Kota	100%
2.	Terselenggaranya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tepat waktu	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah kewenangan provinsi yang difasilitasi	Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	100%
1	Terselenggaranya perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 dokumen
2	Terlaksananya proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	3 lokasi
3	Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah	Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa tanah	7 Kasus

	ANGGARAN	KETERANGAN
1. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 335,671,400	APBD Perubahan
2. Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 335,671,400	
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rp 335,671,400	
4. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Rp 148,563,100	
5. Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Rp 148,563,100	
6. Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Rp 148,563,100	
7. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 147,584,200	
8. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 147,584,200	
9. Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Rp 147,584,200	

Makassar, Desember 2023

Pihak Kedua  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES  
Pangkat: Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 19650531 199111 1 001

Pihak Pertama  
**KEPALA BIDANG PERTANAHAN**

Fakhrudin, SE, M.Si  
Pangkat : Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 19670904 199203 1 015



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
JALAN A. Pengerang Petta Rani No.90 Kotak Telp. (0411) 458489 Makassar

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sari Susanty Syam, ST., M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES**

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

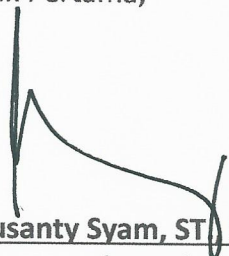
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Desember 2023

Pihak Kedua,

  
**Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip. 19650531 199111 1 001

Pihak Pertama,

  
**Sari Susanty Syam, ST, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19780225 200212 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKERTARIS DINAS**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SUL-SEL**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset daerah	Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100%
		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori Baik dan sangat baik	100%
		Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase Penyusunan laporan keuangan tepat waktu	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Kepegawaian dan Aset Daerah	Jumlah Laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan
		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan
		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	1 Laporan
		Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan
		Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	Keterangan
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Rp 16.915.407.200</b>	<b>APBD PERUBAHAN</b>
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 994.780.600	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 13.005.968.278	
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 255.605.500	
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 420.508.400	
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 346.996.780	
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 395.541.332	
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.496.006.310	

Makassar, Desember 2023

Pihak Kedua  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES**  
Pangkat: Pembina Utama Madya  
NIP. 19650531 199111 1 001

Pihak Pertama  
**SEKRETARIS DINAS**

**Sari Susanty Syarif, ST., M.Si**  
Pangkat: Pembina Tk.I  
NIP. 19780225 200212 2 004



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
JALAN A. PINGERANG PETTA RANI NO.90 KOTAK TELP. (0411) 458489 MAKASSAR

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Eka Farasakti, ST**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **Sari Susanty Syam, ST., M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Desember 2023

Pihak Kedua,

**Sari Susanty Syam, ST., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk I

Nip. 19780225 200212 2 004

Pihak Pertama,

**Eka Farasakti, ST**

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19831001 201101 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KASUBAG PROGRAM**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SUL-SEL**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja	Jumlah Dokumen Renja Pokok yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen
		Jumlah dokumen DPA SKPD	1 Dokumen
		Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kendaran	1 Laporan
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen


SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 726.752.200	APBD PERUBAHAN
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 40.998.000	
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 8.740.200	
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Rp 4.536.300	
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 4.232.200	
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 88.849.000	
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 120.672.700	

Makassar, Desember 2023

Pihak Kedua  
**SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHA**

  
Sari Susanty Syam, ST., M.Si  
Pangkat: Pembina Tk.I  
NIP. 19780225 200212 2 004

Pihak Pertama  
**KEPALA SUB BAGIAN  
PROGRAM**

  
Eka Farasakti, ST  
Pangkat: Penata Tk.I  
NIP. 19831001 201101 2 009



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
JALAN A. Pengerang Petta Rani No.90 Kotak Telp. (0411) 458489 Makassar

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dedy Rudiansyah Hatta, S.T**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama:

Nama : **Sari Susanty Syam, S.T., M.Si**

Jabatan : Sekertaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Agustus 2023

Pihak Kedua,

**Sari Susanty Syam, S.T., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip 19780225 200212 2 004

Pihak Pertama,

**Dedy Rudiansyah Hatta, S.T**  
Pangkat : Penata Tk.I  
Nip. 19840822 201101 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SUL-SEL**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen
2	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
3	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
4	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
5	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
6	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
7	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang
8	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
9	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
10	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
11	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
12	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
14	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit
15	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit
16	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 32.188.000	APBD
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 75.804.700	APBD
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 73.860.000	APBD
4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 81.910.000	APBD
5. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 137.998.000	APBD
6. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 102.525.000	APBD
7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 120.904.000	APBD
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 45.808.000	APBD
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 223.095.000	APBD
10. Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 28.221.500	APBD
11. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 100.052.500	APBD
12. Pengadaan Mebel	Rp 50.000.000	APBD
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 475.083.532	APBD
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 955.611.080	APBD
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 142.800.000	APBD
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 476.337.500	APBD
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp 3.122.198.812</b>	

Makassar, Agustus 2023

Pihak Pertama  
**SEKRETARS DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Sari Susanty Syam, S.T., M.Si  
Pangkat: Pembina Tk.I  
NIP. 19780225 200212 2 004

Pihak Kedua  
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM**

Dedy Rudiansyah Hatta, S.T  
Pangkat: Penata Tk.I  
NIP. 19840822 201101 1 009



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
JALAN A. PINGERANG PETTA RANI NO.90 KOTAK TELP. (0411) 458489 MAKASSAR

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Andi Andrie Apriyanto Mashuri, S.STP**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama:

Nama : **Sari Susanty Syam, S.T., M.Si**

Jabatan : Sekertaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Agustus 2023

Pihak Kedua,

**Sari Susanty Syam, S.T., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip 19780225 200212 2 004

Pihak Pertama,

**Andi Andrie Apriyanto Mashuri, S.STP**

Pangkat : Penata Tk.I

Nip. 19850414 200312 1 001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KASUBAG KEUANGAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SUL-SEL**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan
		Jumlah dokumen Hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 dokumen
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dokumen
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan
		Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan
		Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Laporan

SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 11,471,059,171	APBD
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 9,100,000	
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 77,043,500	
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 213,274,800	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 11,640,000	
6.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 37,233,600	
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Rp 12,751,800	
8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 51,566,300	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>Rp 11,883,669,171</b>	

Makassar, Agustus 2023

Pihak Kedua  
**SEKRETARS DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

  
**Sari Susanty Syam, S.T., M.Si**  
Pangkat: Pembina Tk.I  
NIP. 19780225 200212 2 004

Pihak Pertama  
**Kepala Sub Bagian Keuangan**

  
**Andi Andrie Apriyanto Mashuri, S.STP**  
Pangkat: Penata Tk.I  
NIP. 19850414 200312 1 001